

# MODERASI BERAGAMA SEBAGAI HIDDEN CURRICULUM DI PERGURUAN TINGGI



*Hendri Purbo Waseso & Anggitiyas Sekarinasih\**

UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, email: hendri@iainpurwokerto.ac.id

UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, email: anggitiyas@iainpurwokerto.ac.id

---

## INFO ARTIKEL

---

**Kata Kunci:**  
*Hidden Curriculum,  
Moderasi  
Beragama dan  
Ideologi.*

---

**Keywords:**  
*Hidden curriculum,  
religious  
moderation and  
ideology*

---

## ABSTRAK

Tumbuhnya radikalisme di perguruan tinggi berdasar hasil survey dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan. Artikel ini hendak menawarkan suatu ramuan agar pemikiran radikal di perguruan tinggi tidak menular dan menginfeksi secara sistemik. Melalui *literature review* dan analisa kualitatif ditemukan bahwa: a) dalam kacamata Apple, tumbuhnya radikalisme di perguruan tinggi berasal dari ideologi yang bekerja dalam sistem pendidikan yang dibangun; b) moderasi beragama perlu dijadikan sebagai *tameng* atau *counter* dari tumbuhnya benih-benih radikalisme; c) operasionalisasi moderasi beragama (sikap toleran dan inklusif) sebagai *hidden curriculum* dapat dilakukan dalam tiga posisi sekaligus yaitu *hidden curriculum* menjadi instrument, moderasi beragama sebagai nilai yang di-*hidden* dan moderasi beragama sebagai *hidden curriculum* direncanakan secara tersembunyi dengan menurunkan CPL menjadi CPMK yang lebih operasional dan dapat diukur.

---

## ABSTRACT

*The growth of radicalism in higher education based on survey results in recent years has increased. This article wants to offer a concoction so that radical thinking in higher education is not contagious and systemic. Through the literature review and qualitative analysis it was found that: a) in the eyes of Apple, the growth of radicalism in higher education came from the ideology that worked in the education system that was built; b) religious moderation needs to be used as a shield or counter to the growth of the seeds of radicalism; c) operationalization of religious moderation (tolerant and inclusive attitude) as a hidden curriculum can be carried out in three positions at the same time the hidden curriculum becomes an instrument, religious moderation as a hidden value and moderation of religion as a hidden curriculum is planned in secret by reducing CPL to more CPMK operational and measurable.*

---

## Pendahuluan

Saat ini moderasi Islam dirasa perlu, bahkan mendesak untuk ditransformasikan dengan alasan bahwa masyarakat kita rentan dan berpotensi baik secara sadar maupun tidak sadar terlibat dalam paham-paham radikal-fundamentalis. Paham radikal-

fundamentalis ini cenderung menghalalkan kekerasan atas nama agama karena sifat pemikirannya yang literalis-destruktif (Ahmad, 2014:161-162). Terorisme adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat mengkhawatirkan dari paham radikal-fundamentalis, wacana negara khilafah juga termasuk di dalamnya. Tumbuhnya paham tersebut

tidaklah muncul secara tiba-tiba, namun secara sistemik masuk dalam pemikiran masyarakat. Berawal dari sikap keberagamaan yang eksklusif sampai pada internalisasi membenaran tafsir terhadap sumber ajaran Islam untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. Haryatmoko (2004:62-76) mencatat bagaimana sikap 'tidak bisa menerima yang berbeda' ini menjadi motif utama konflik Islam-Kristen di Indonesia. Sampai di sini, gagasan moderasi Islam menemukan pijakan kuat yaitu dalam rangka menjaga dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Islam moderat tidak mengubah apapun jika tidak segera digunakan sebagai basis atau dasar dari sikap dan pandangan kita terhadap realitas beragama dan berbangsa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya untuk menanamkan paham Islam moderat ini kepada generasi muda bangsa. Jadi, moderasi pendidikan Islam merupakan suatu upaya sadar dan sistematis untuk mentransformasikan sikap toleran dan inklusif dalam diri peserta didik dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Sikap toleran dan inklusif (Ahmad, 2014:158) ini merupakan inti dari paham Islam moderat. Sedangkan pendidikan dijadikan sebagai bentuk gerakan kebudayaan dan alat utama dalam transformasi Islam moderat.

Persoalannya sekarang adalah minimnya peran umat Islam Indonesia dalam merampungkan baik konsepsi maupun praktik pendidikan yang mengarah pada gerakan moderasi Islam. Faisal Ismail (2014:175-176) menyebut bahwa umat Islam tidak hadir secara fungsional dalam tata kehidupan masyarakat. Padahal secara kuantitatif,

umat Islam di Indonesia adalah mayoritas atau 87,5 persen dari total penduduk Indonesia, bahkan umat Islam di Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Paradoksal ini kentara jika melihat peran dan sumbangsih umat Islam yang berjalan lamban dalam tata kehidupan masyarakat. Secara spesifik, pendidikan kita terjebak pada nalar kompetisi yang mengedepankan prestasi. Agus Nuryatno (2011:70-71) menyebut ideologi kompetisi ini sama dengan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang lemah. Faktanya, nalar kompetisi ini masih digunakan dalam praktik pendidikan kita saat ini. Secara logis hal tersebut berarti pendidikan kita masih mengedepankan eksklusifitas di bandingkan dengan inklusifitas. Padahal, gerakan moderasi Islam menggunakan nalar inklusif dalam tafsirnya terhadap realitas. Bahkan, pendidikan Islam sekarang sulit mencari distingsinya dengan pendidikan umum. Madrasah misalnya sulit dibedakan dengan sekolah selain dari pada struktur kurikulum yang digunakan. Hal tersebut berarti kita berjalan mengikuti arus dan di waktu yang sama melupakan identitas kita sendiri. Sangatlah tepat jika moderasi pendidikan Islam menjadi pembeda sekaligus ruh dari praktik pendidikan Islam terutama di madrasah.

Selain itu, kondisi guru saat ini juga kontraproduktif dengan upaya moderasi Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menemukan banyaknya guru Pendidikan Agama Islam di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran terhadap

kelompok yang berbeda paham dengan mereka (Darmadi, [www.ppim.uinjkt.ac.id](http://www.ppim.uinjkt.ac.id), 3/5/2018). Padahal seharusnya guru PAI menjadi pelopor gerakan moderasi Islam.

Di tingkat perguruan tinggi, problematika kontra moderasi ditunjukkan oleh berbagai pihak. Hasil survey Wahid Foundation 2016 menunjukkan bahwa ada sekitar 11 juta atau 7,7 persen dari total penduduk Indonesia yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam radikalisme dan sebagian besar dari kalangan mahasiswa. (Rendika Ferri K, [www.jogja.tribunnews.com](http://www.jogja.tribunnews.com), 13/09/2018). Selanjutnya menurut Penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 mencatat bahwa sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme. (Wishnugroho Akbar, [www.ccnindonesia.com](http://www.ccnindonesia.com), 29/04/2018). Fakta tersebut dikuatkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius bahwa penyebaran paham negatif radikalisme di wilayah kampus sudah sangat memprihatinkan. Bahkan banyak dosen yang juga terpapar radikalisme sehingga ketika mereka menjadi mentor malah membawa anak didiknya ke paham negatif tersebut. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 27/08/2018). Beberapa data tersebut semakin menguatkan argumentasi terkait perlunya perhatian dari berbagai pihak agar problematika kontra moderasi dapat dibendung.

Dalam tulisan ini, pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis adalah bagaimana meminimalisir atau bahkan mengampulasi gerakan-gerakan yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi pada mahasiswa di Perguruan

Tinggi?. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan upaya menjadikan toleransi dan sikap inklusif sebagai *hidden curriculum* pada perguruan tinggi. Sikap toleran dan inklusif ini merupakan inti dari pada moderasi beragama sehingga ketika mahasiswa terinternalisasi sikap toleran dan inklusif maka moderasi beragama bukanlah hal yang berhenti pada tataran wacana.

### **A. Metode dan Materi Kajian**

Materi kajian dalam tulisan ini adalah moderasi beragama sebagai *hidden curriculum*. Dengan menggunakan metode *library research*, penulis menelaah berbagai produk kebijakan perumusan kurikulum perguruan tinggi baik yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti maupun Kemenag. Produk tersebut adalah berupa buku panduan yang berjudul Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Belmawa Dikti. Sedangkan Diktis Kemenag menerbitkan dokumen panduan berjudul Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti. Adapun dokumen pendukungnya yaitu Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik *deskriptif analitik*. Sedangkan untuk melakukan interpretasi atas data-data penelitian dalam analisisnya digunakan

pola penalaran abduktif atau reflektif. Dalam proses konseptualisasi moderasi beragama sebagai *hidden curriculum*, penulis menggunakan teori kurikulum Michael Apple.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Moderasi Beragama (Islam)**

#### **Sebagai Ideologi**

Memposisikan moderasi Islam sebagai ideologi pendidikan Islam mengarah pada diskusi tentang ideologi. Konsep ideologi sendiri sudah banyak yang menjelaskannya secara mendalam seperti Marx, Mannheim, Althusser, Hardiman dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan, ideologi dimaknai oleh Sargent dalam O'neil (2008:33) bahwa:

...sebuah ideologi adalah sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ia tersusun dari serangkaian sikap terhadap berbagai lembaga serta proses masyarakat. Ia menyediakan potret dunia sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya dunia itu bagi mereka yang meyakini. Dan, dengan melakukan itu, ia mengorganisir kerumitan atau kompleksitas yang besar di dunia menjadi sesuatu yang cukup sederhana dan dapat dipahami. ....

Ideologi dalam pendidikan melihat definisi di atas dengan sendirinya merupakan suatu sistem nilai yang menyatu dalam diri subjek. Secara sederhana, seorang guru yang sedang berada di kelas di mana ia melakukan proses pembelajaran, maka guru tersebut menggunakan ideologi pendidikan tertentu tanpa ia belajar mengenai ideologi. Istilah lain yang dapat menjelaskan ideologi pendidikan adalah

filosofi pendidikan. Guru yang menganut ideologi pendidikan konservatif (filsafat perrenialisme atau essensialis) misalnya, maka dalam mengajar ia selalu mengacu pada buku teks sebagai acuan utamanya. Jelaslah bahwa ideologi pendidikan berperan dalam pembentukan cakrawala pengetahuan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan pembahasan mengenai ideologi pendidikan Islam secara spesifik telah dilakukan oleh Achmadi. Dalam bukunya, Achmadi (2010:12) menawarkan ideologi humanisme-teosentris yang menitikberatkan pada pengembangan fitrah sebagai manusia dan memadukannya dengan prinsip-prinsip ketauhidan. Barangkali kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan teknis-administratif sehingga penterjemahan ideologi humanisme-teosentris ini berhenti pada tataran teoritik. Selain itu, wilayah kerja dari ideologi humanisme-teosentris masih terlalu luas sehingga sulit untuk diukur.

Sekarang kita membutuhkan kejelasan mengenai moderasi Islam yang nantinya menjadi alternatif dari ideologi pendidikan Islam. Sudah banyak yang menjelaskan konsep Islam moderat baik secara bahasa maupun akar penggunaannya (Suharto, 2014:89-90; Futaqi, 2018, 521-530). Dalam tulisan ini, saya mengutip Moderasi Islam atau Islam moderat yang didefinisikan oleh Suharto (2014:89-90) sebagai berikut:

.... Islam moderat bagi Indonesia adalah Islam yang bukan ekstrem atau radikal, yang senantiasa tidak menekankan pada kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Kelompok

Islam liberal atau kelompok Islamis, selama mereka menempuh jalur yang bukan *rahmah*, maka itu bukan dikategorikan Islam moderat. Dengan ini, Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal (*tawassut*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama; toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Qur'ân atau Sunnah. Dengan karakter ini, Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda....

Senada dengan pengertian di atas, Ahmad (2014:161-162) menarik inti dari Islam moderat dalam dua istilah yaitu teologi toleransi dan teologi inklusivisme. Hal tersebut berarti, sistem nilai yang dianut dalam praktik pendidikan Islam adalah toleransi dan dengan sendirinya berarti anti kekerasan. Dalam bahasa lain, Islam moderat tidak pernah mengkapling suatu kebenaran sehingga bersifat terbuka dan tidak eksklusif. Islam moderat bukan milik mereka yang mengaku sebagai muslim moderat, akan tetapi mereka yang secara sikap dan perilaku menunjukkan watak toleransi dan inklusif. Toleransi dan inklusif ini difungsikan ketika dihadapkan pada perbedaan-perbedaan,

baik perbedaan agama, etnis, gender, budaya dan lain-lain. Ini yang saya maksud moderasi Islam sebagai alternatif ideologi pendidikan Islam.

Moderasi Islam sebagai ideologi diperlukan suatu mekanisme dalam strukturasi tindakan sosial sehingga memiliki efektivitas sosial. Dalam hal ini, Haryatmoko (2014:62-76) memiliki tiga istilah penting dalam menjelaskan mekanisme ideologi yaitu skematisasi, idealisasi dan retorika. Proses pertama adalah skematisasi yang mengubah sistem pemikiran menjadi sistem keyakinan. Proses ini sangat tepat dilakukan melalui proses pendidikan. Meskipun demikian, membutuhkan waktu dan strategi yang tepat agar proses skematisasi dapat berjalan dengan baik. Setelah skematisasi, idealisasi menjadi terbentuk yaitu berupa gambaran identitas yang direpresentasikan dalam bentuk sikap-sikap. Dalam proses idealisasi ini saran Haryatmoko yaitu sebisa mungkin menghindari godaan menjadi doktriner karena jika terjadi maka akan berhadapan dengan kritik ideologi. Dan proses terakhir adalah retorika. Retorika ini oleh Haryatmoko diartikan sebagai seni membujuk (Haryatmoko, 2014:62-76). Jika ketiga mekanisme ideologi tersebut berjalan dengan baik, maka moderasi Islam bisa memiliki efektivitas sosial.

Sampai di sini, kita perlu menderivasikan moderasi Islam sebagai ideologi pendidikan Islam dalam wilayah praksis pendidikan. Hal tersebut menjadikan moderasi Islam benar-benar berfungsi sebagai suatu ideologi. Wilayah praksis pendidikan adalah meliputi semua dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dari mulai pengambil kebijakan sampai dengan

peserta didik, dari mulai kurikulum sampai dengan manajemen pembelajaran di kelas. Wilayah praksis ini tidak diartikan sebagai suatu aktifitas yang kering makna. Lebih dari itu, praktik pendidikan harus benar-benar diposisikan sebagai bagian dari perjuangan kebudayaan. Pendidikan dalam arti ini adalah tidak dimaknai secara sempit, namun terdapat keterkaitan dengan bidang kehidupan lain yang saling mempengaruhi. Kita bisa mengatakan bahwa seorang guru mengajar di kelas adalah suatu aktifitas kebudayaan. Dengan cara ini, kehidupan pendidikan bangsa kita tidak terjebak pada logika formalisme.

Moderasi Islam sesungguhnya bentuk dari politik kebudayaan yang positif dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soedjatmoko (1984:51) telah menawarkan apa yang disebut sebagai mobilisasi mental. Mobilisasi mental ini secara otomatis merupakan suatu usaha kolektif masyarakat dengan segala kemampuannya untuk mewujudkan suatu politik kebudayaan yang khas Indonesia. Dengan moderasi Islam sebagai ideologi, pendidikan sebagai subjek ideologi, dan mobilisasi mental sebagai strategi kebudayaannya, maka pendidikan Islam akan secara nyata memberi sumbangan besar terhadap bangsa, negara dan agama.

## **2. Deskripsi Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu KKNI**

Kurikulum perguruan tinggi memasuki babak baru dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perguruan tinggi sudah tidak bisa lagi

mengelak dari pengaruh dunia kerja yang menuntut berbagai macam kompetensi yang sesuai. Sedangkan perguruan tinggi sebagai produsen tenaga kerja tidak mampu memproduksi sumber daya manusia yang memiliki kualitas memadai. Hal tersebut setidaknya dapat terlihat dari pengamatan sekilas mengenai banyaknya sarjana yang beralih profesi atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam beberapa hal, kualifikasi dengan pekerjaan yang digeluti justru tidak linier. Barangkali hal tersebut yang menjadi latar dari perlunya perumusan kurikulum perguruan tinggi mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).

Jika mendasarkan pada buku yang diterbitkan oleh Belmawa-Dikti terkait dengan pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi, Kurikulum Perguruan Tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Belmawa, 2016:3). Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan atau proses pembelajaran memiliki ukuran-ukuran yang jelas sehingga *output* lulusan dapat menjadi indikator utama dalam keberhasilan suatu program studi. Sedangkan kurikulum perguruan tinggi versi Diktis lebih menekankan pada upaya mempertegas distingsi antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama yaitu pada sisi integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan (Diktis, 2018:2). Penegasan tersebut merupakan konsekuensi logis dari baik dokumen panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Belmawa-

Dikti maupun Diktis, keduanya merupakan operasionalisasi kebijakan mengenai KKNI. Panduan yang disusun Belmawa-Dikti menjadi acuan bagi perguruan tinggi umum dan panduan yang disusun Diktis menjadi acuan bagi perguruan tinggi Islam. Oleh karena kedua buku panduan tersebut merupakan operasionalisasi dari kebijakan KKNI, maka dasar yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan dokumen Perpres Nomor 8 Tahun 2012 pasal 2 ayat 2, terdapat Sembilan jenjang kualifikasi yaitu jenjang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) dikelompokkan dalam jabatan teknisi, dan jenjang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) dikelompokkan dalam jabatan ahli. Untuk pendidikan sarjana berada pada jenjang 6 (enam) dan termasuk dalam jabatan teknisi atau analis. Adapun uraian kualifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Uraian kualifikasi tersebut di atas menjadi pedoman utama dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu KKNI. Dalam bahasa yang lebih fungsional, mahasiswa lulusan sarjana pada suatu perguruan tinggi wajib memiliki empat kualifikasi yang telah ditentukan tersebut. Dalam hal ini, program studi perlu merumuskan secara sistematis apa yang diperlukan dalam rangka menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan KKNI. Rumusan sistematis tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen kurikulum. Itulah yang kita sebut sebagai kurikulum perguruan tinggi mengacu pada KKNI.

Dalam proses penyusunan dokumen kurikulum, perguruan tinggi dapat merumuskan tahapan demi tahapan sesuai dengan buku panduan yang diterbitkan Kemeristekdikti untuk perguruan tinggi umum dan buku panduan yang diterbitkan Kemenag untuk perguruan tinggi Islam. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, kurikulum perguruan tinggi secara garis besar berisi tentang tiga hal yaitu tahap perancangan kurikulum, tahap perancangan pembelajaran dan tahap evaluasi program pembelajaran (Belmawa, 2016: iv-v; Diktis, 2018: ii).

*Pertama*, tahap perancangan kurikulum. Dalam tahap ini memuat secara konseptual isi dari kurikulum yang terdiri dari penyusunan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah. Penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) diawali dengan menentukan profil lulusan sesuai dengan masukan asosiasi prodi dan stakeholder. Profil lulusan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Dalam capaian pembelajaran lulusan, acuan yang digunakan adalah kualifikasi sesuai jenjang KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Terdapat empat unsur yang harus ada dalam CPL yaitu unsur sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus. Untuk unsur sikap dan ketrampilan umum terdapat pada lampiran SN-Dikti, sedangkan pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan asosiasi prodi. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Unsur               | Rujukan   | Keterangan   |
|----|---------------------|---|--|
| 1  | Sikap               | Sesuai dengan SNPT  | Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 |
| 2  | Keterampilan Umum   | Sesuai dengan SNPT  | Lihat Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 |
| 3  | Keterampilan Khusus | Sesuai dengan level KKNI dalam merumuskan keterampilan khusus | Merujuk pada lampiran Perpres nomor 8 tahun 2012               |
| 4  | Pengetahuan         | Sesuai dengan level KKNI                                      | Merujuk pada lampiran Perpres nomor 8 tahun 2012               |

Sumber : (Diktis, 2018:10)

Tabel 1. Rujukan Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama dalam menyusun matrik bahan kajian yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk mata kuliah-mata kuliah. Poin penting yang diperhatikan adalah kesesuaian antara CPL, bahan kajian dan sebaran mata kuliah. Artinya, jika terdapat mata kuliah yang tidak sesuai dengan bahan kajian atau CPL, maka mata kuliah tersebut harus dihilangkan.

*Kedua*, tahap perancangan pembelajaran. Tahap perancangan pembelajaran menjadi tanggung jawab setiap dosen. Dalam perancangan pembelajaran, dosen menyusun capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dengan mengacu pada CPL yang telah dirumuskan dalam kurikulum program studi. CPMK yang telah dirumuskan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS memuat rencana pembelajaran yang dilakukan dimulai dari proses sampai dengan penentuan evaluasi yang digunakan. Prinsip dalam penyusunan rencana pembelajaran ini menggunakan paradigma pembelajaran *Student center learning* (SCL). Sedangkan dalam merumuskan evaluasi pembelajaran, dosen harus membuat instrument penilaian baik proses maupun hasil pembelajaran.

*Ketiga*, tahap evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan oleh program studi sebagai pelaksana dari kurikulum yaitu dengan menggunakan angket yang memposisikan mahasiswa sebagai respondennya. Hasil pengolahan analisis angket tersebut menjadi instrument utama untuk memberi rekomendasi-rekomendasi perbaikan kurikulum program studi selanjutnya.

### **3. Operasionalisasi Moderasi Beragama Sebagai *Hidden Curriculum* di Perguruan Tinggi**

Menjabarkan konsep secara operasional bukanlah hal yang mudah. Kesulitan ini terletak pada bagaimana memastikan bahwa suatu konsep dapat dilaksanakan di lapangan. Begitu juga dengan mengoperasionalisasi moderasi beragama (Islam) sebagai *hidden curriculum*. Agar tujuan dari tulisan ini dapat tercapai, perlu dijelaskan diskursus *hidden curriculum*.

*Hidden curriculum* secara bebas dapat diartikan sebagai kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi ini berarti tidak muncul secara tersurat dalam kurikulum namun secara tersirat dapat diketahui. Merfat Ayesah Alsubaie menemukan bahwa *hidden curriculum* berdampak pada perilaku, keyakinan, pengalaman, skil dan pengetahuan siswa (Alsubaie, 2015:127). Ia mencoba menganalisa temuan Schiro dan Vygotsky dengan pengalaman mengajarnya di sekolah dasar K.S.A. Kurikulum tersembunyi dapat berfungsi secara efektif untuk mengirim pesan positif dalam diri siswa jika guru dapat menyadari bagaimana kurikulum tersembunyi ini dilaksanakan.

Berbeda dengan Alsubaie, Apple lebih mengkaitkan kurikulum tersembunyi dengan relasi-relasi reproduksi ekonomi dan budaya melalui apa yang disebutnya sebagai kondisi hegemonik (Apple, 2004:77). Asumsinya adalah pendidikan formal memberi sumbangan yang besar terhadap keberlangsungan suatu ideologi tertentu yang dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut dilakukan dalam situasi yang tidak disadari oleh para

praktisi pendidikan. Pendidikan formal akan selalu terlihat netral, bebas dari keterkaitan kondisi politik, ekonomi dan budaya sekitarnya. Padahal menurut Apple, di sana terdapat *hidden curriculum* yang patut disadari keberadaannya.

Jika dianalisa dengan teorinya Apple, tumbuhnya radikalisme di perguruan tinggi tidaklah muncul secara tiba-tiba (*taken for granted*) melainkan adanya suatu ideologi radikal yang disisipkan pada mahasiswa. Tentu kemunculan tersebut memiliki konteks sosial-budaya-politik tertentu. Puncak keberhasilan ideologi radikalisme bisa dilihat dari aksi kolektif yang terorganisir. Dalam bahasa Haryatmoko 'ingatan kolektif' telah mendominasi masyarakat sehingga menjadi doktrin. Dalam konteks inilah, moderasi beragama (Islam) menjadi signifikan untuk dijadikan sebagai *hidden curriculum*.

Moderasi beragama dalam konteks ini diartikan sebagai kepemilikan sikap moderat oleh orang yang beragama. Dalam moderasi Islam, sikap moderat dapat ditunjukkan dengan kepemilikan sikap toleran dan inklusif (Ahmad, 2014:158). Hal tersebut berarti moderasi beragama (Islam) berarti keberagaman orang Islam yang ditunjukkan dengan sikap menghormati terhadap yang berbeda dan sikap tidak merasa yang paling benar.

Penulis mendudukan konsep *hidden curriculum* dalam tiga posisi sekaligus. *Pertama*, *hidden curriculum* diposisikan sebagai instrument utama dalam transformasi ideologi yang sesuai dengan ideologi bangsa. Hal tersebut diperlukan karena tidak semua perguruan tinggi dapat dikontrol

berkaitan dengan ideologi apa yang sedang berjalan di lembaga tersebut. Regulasi memberi kebebasan kepada setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Barangkali perguruan tinggi negeri lebih mudah untuk diantisipasi berkaitan dengan problematika ideologi karena pemerintah memiliki *power* yang cukup untuk mengendalikannya. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta yang tidak sedikit pendiriannya berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Meskipun demikian, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta tetap memiliki potensi disisipi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara. Hal tersebut mungkin terjadi jika pengelola perguruan tinggi tersebut didominasi oleh orang-orang yang berideologi radikal sehingga moderasi beragama ini menjadi signifikan.

Tawarannya adalah moderasi beragama dapat diposisikan sebagai *hidden curriculum* dalam rangka mencegah tumbuhnya ideologi radikalisme di perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan –seperti yang dikatakan Alsubaie– menyadarkan dosen pentingnya pemahaman terhadap mahasiswa terkait dengan ideologi apa yang sedang menguasainya. Jika ternyata tumbuhnya ideologi radikalisme mahasiswa berasal dari dosennya, maka dosen yang menyadari tentang tumbuhnya ideologi tersebut memberikan konter ideologi dengan menciptakan lingkungan-lingkungan pembelajaran yang toleran dan inklusif.

*Kedua*, posisi moderasi beragama sebagai ideologi dapat ditafsirkan sebagai transformasi sikap toleran dan inklusif kepada mahasiswa dalam

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan moderasi agama sebagai *hidden curriculum* berarti mengajarkan sikap toleran dan inklusif bukan sebagai mata kuliah melainkan sebagai nilai-nilai yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut tidak dibatasi pada mata kuliah-mata kuliah tertentu karena yang di-*hidden* adalah nilai toleran dan inklusif. Dosen Psikologi tidak berbeda dengan Dosen Pendidikan Agama Islam dalam operasionalisasi *hidden curriculum* tersebut, karena yang dibidik bukan materi kuliah melainkan *value*.

Secara praktis misalnya dosen psikologi memberi materi ‘aliran behaviorisme’ dalam mata kuliah psikologi umum. Dosen dapat menggunakan *cooperative learning* dan *discovery learning* dengan menugaskan mahasiswa untuk berdiskusi secara kelompok dan mencari materi yang berkaitan dengan sumber-sumber materi yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar secara tidak sadar mahasiswa memiliki pengetahuan yang tidak tunggal sembari melihat proses diskusi kelas. Dalam proses diskusi kelas ini, dosen berperan penting agar internalisasi sikap toleran dan inklusif dapat berhasil. Tidak berbeda dengan dosen pengampu mata kuliah-mata kuliah lain. Artinya, nilai-nilai toleran dan inklusif dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran melalui pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang tepat.

*Ketiga*, moderasi beragama sebagai *hidden curriculum* dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum perguruan tinggi. Operasionalisasi posisi ini lebih menekankan pada perencanaan yang sistematis mengenai bagaimana

moderasi beragama itu berfungsi secara efektif dan dapat terukur dengan jelas. Hal yang bisa dilakukan adalah mengembangkan capaian pembelajaran lulusan pada unsur sikap yang diturunkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang sesuai dengan nilai-nilai toleran dan inklusif. Tentu CPMK ini tidak dimunculkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan disampaikan kepada mahasiswa. Hal tersebut dilakukan karena sifatnya yang *hidden*.

Secara operasional, moderasi beragama sebagai *hidden curriculum* dapat dirumuskan dengan melihat CPL unsur sikap yang telah ditentukan dalam lampiran Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Rumusan sikap di atas masih sangat umum dan perlu dispesifikasikan lebih lanjut dalam CPMK. Misalnya rumusan sikap “menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain”. Rumusan sikap tersebut sangat mungkin tidak berfungsi secara operasional dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu kalimat yang lebih operasional dalam hal ini memosisikan sikap toleran dan inklusif sebagai nilai utama yang digunakan. Misalnya CPL “menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain” diturunkan menjadi beberapa CPMK berikut:

- a. Bersikap *friendly* kepada teman sekelas tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan antargolongan.
- b. Mau mendengarkan pendapat orang lain dalam diskusi kelas.
- c. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

- d. Berani mengakui kesalahannya sendiri.
- e. Menolak konsep Negara Islam (Khilafah) di Indonesia

CPMK tersebut secara *hidden* dirumuskan konsep strategi dan metode yang sesuai. Alsubaie menawarkan strategi pembelajaran simulasi, role playing, problem solving dan cooperative learning sebagai strategi yang tepat untuk memberi dampak positif terhadap sikap mahasiswa sesuai yang direncanakan –hidden curriculum– dosen.

Memposisikan moderasi beragama sebagai hidden curriculum dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa sekaligus. Dosen dapat mengetahui dan menyadari sehingga dapat mengantisipasi apabila ideologi radikalisme telah tumbuh di lingkungan kampus. Sedangkan mahasiswa secara tidak sadar terbentengi dari benih-benih radikalisme karena sikap toleran dan inklusif menjadi *hidden curriculum* dalam pembelajaran di kelas.

### C. Kesimpulan

Terdapat beberapa hal sebagai kesimpulan dari uraian tulisan di atas, yaitu *pertama*, dalam kacamata Apple, tumbuhnya radikalisme di perguruan tinggi berasal dari ideologi yang bekerja dalam sistem pendidikan yang dibangun. *Kedua*, moderasi beragama perlu dijadikan sebagai tameng atau konter dari tumbuhnya benih-benih radikalisme. *Ketiga*, operasionalisasi moderasi beragama (sikap toleran dan inklusif) sebagai hidden curriculum dapat dilakukan dalam tiga posisi sekaligus yaitu *hidden curriculum* menjadi instrument, moderasi beragama sebagai nilai yang di-*hidden* dan moderasi

beragama sebagai *hidden curriculum* direncanakan secara tersembunyi dengan menurunkan CPL menjadi CPMK yang lebih operasional dan dapat diukur.

### Referensi

- Belmawa, 2016. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi, Jakarta: Ristekdikti.
- Diktis, 2018. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti, Jakarta: Diktis.
- Alsubaie, Merfat Ayes. Hidden Curriculum as One of Current Issue of Curriculum, *Journal of Education and Practice*. Vol. 6, No. 33, 2015.
- Apple, Michael. 2004. *Ideology and Curriculum*. Newyork: Routledge.
- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad, Masrur, *Islam Hijau; Merangkul Budaya Menyambut Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Al Qodir Press, 2014.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan Analisa Historis*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- Nuryatno, Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis; Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- O'neil, William F., *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1984.

Suharto, Toto, Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia, *Islamika; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, September 2014.

Futaqi, Sauqi, Konstruksi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pendidikan Islam, *Proccedings The Second Annual Conference For Mosliem Scholars 2018*, Kopertais IV Wilayah Surabaya.

Akbar, Wishnugroho, [www.ccnindonesia.com](http://www.ccnindonesia.com), 29/04/2018 diakses pada tanggal 4 Desember 2018

Darmadi, [www.ppim.uinjkt.ac.id](http://www.ppim.uinjkt.ac.id), 3/5/2018 diakses pada tanggal 4 Desember 2018

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 27/08/2018) diakses pada tanggal 4 Desember 2018

K, Rendika Ferri K, [www.jogja.tribunnews.com](http://www.jogja.tribunnews.com), 13/09/2018 diakses pada tanggal 4 Desember 2018